

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara yang mempunyai latar belakang perbedaan antar daerah, dimana perbedaan antar daerah merupakan konsekuensi logis dari perbedaan karakteristik alam, ekonomi, sosial dan budaya, sebaran sumber daya alam khususnya minyak dan gas, pertumbuhan pusat perdagangan dan industri yang terkonsentrasi di beberapa daerah yang menyebabkan timbulnya kantong-kantong pertumbuhan, sehingga ketimpangan output antar daerah menjadi lebih tinggi. Dengan adanya ketimpangan output daerah yang tinggi, tingkat ketimpangan pendapatan per orang antar daerah menjadi relatif terlihat.

Pelaksanaan pembangunan senantiasa diarahkan pada pencapaian tiga sasaran pembangunan, ketiga sasaran tersebut dikenal dengan sebutan “trilogy pembangunan”. Dalam Pelita I (1969-1974) prioritas pertama diarahkan pada sasaran pemeliharaan stabilitas perekonomian, disusul oleh sasaran pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Urutan ini diubah dalam Pelita II yaitu sasaran pertumbuhan menempati prioritas pertama, baru kemudian sasaran pemerataan dan sasaran stabilitas. Sejak Pelita III (1979-1984) hingga Repelita VI, urutan prioritasnya menjadi pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas. Masalah mulai muncul jika terjadi perubahan ke arah ketimpangan yang makin melebar antara golongan kaya dan golongan miskin. Ketimpangan

distribusi pendapatan pada daerah-daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda-beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Hal ini menyebabkan pola ketimpangan distribusi pendapatan daerah dan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan daerah semakin melebar.

Dalam pembangunan ekonomi diharapkan adanya dukungan bukan saja dari pertumbuhan kualitas dan kuantitas sumber daya serta kemajuan teknologi tapi juga oleh struktur sosial dan politik yang stabil sehingga mampu mempercepat jalannya pembangunan ekonomi tersebut. Salah satu tolak ukur pembangunan ekonomi suatu negara adalah kesempatan kerja yang diciptakan oleh adanya pembangunan ekonomi. Namun kenyataannya perluasan kesempatan kerja masih merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini mengingat jumlah penduduk dan angkatan kerja serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kondisi yang demikian akan menjadi masalah jika tidak didukung oleh kekuatan ekonomi.

Usaha pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional Indonesia yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur, mencakup ruang lingkup yang luas, yang di dalamnya terdiri dari lingkup pembangunan daerah yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Pembangunan bukan merupakan tujuan melainkan hanya alat sebagai proses untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Jadi berkurangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti dari pembangunan. Selama

pertumbuhan ekonomi dan hasil-hasil dari pembangunan dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat, maka masalah ketidakmerataan distribusi pendapatan tidak akan muncul. Jika kinerja ekonominya lebih baik atau mengalami kemajuan maka seluruh rakyat juga harus merasakan dampak kemajuan tersebut dalam bentuk naiknya pendapatan.

Berdasarkan sasaran tersebut, pembangunan daerah dapat menjadi suatu jembatan dalam realisasi pembangunan nasional. Persoalan ketimpangan antar daerah, misalnya, merupakan salah satu pokok permasalahan dari berbagai persoalan besar lainnya yang hingga kini masih terus-menerus diagendakan. Tidak kurang mulai dari sekedar tuntutan peningkatan porsi keuangan daerah hingga gerakan pembangkangan yang mengarah pada ancaman pemisahan dari wilayah kesatuan Indonesia akhir-akhir ini semakin gencar dilakukan berbagai kalangan.

Tuntutan muncul sebagai respon dari rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh berbagai daerah. Selama ini pemerintah pusat terlalu memikirkan kepentingan dirinya ketimbang kepentingan daerah. Padahal, untuk mewujudkan kepentingan pusat, tidak terhitung lagi beberapa besar sumber-sumber kekayaan daerah yang telah diberikan. Sementara, pola-pola pendistribusian hasil-hasil pembangunan yang selama ini dilakukan dianggap masih kurang sepadan yang mengakibatkan adanya ketimpangan daerah.

Dari sebagian daerah, ketidakadilan yang dirasakan, diperparah oleh minimnya perbaikan program-program pemerataan. Yang terlihat, meskipun secara konseptual pembangunan selalu menjadi salah satu prioritas pembangunan, tetapi

jurang pemisah antara pusat dan daerah semakin melebar, sehingga dikotomi pusat dan daerah pun lambat laun menjadi semakin menebal.

Secara sederhana, segenap nilai kegiatan ekonomi baik berupa produksi barang maupun jasa suatu daerah dalam satu satuan waktu (tahun) dapat dijadikan indikator. Dalam hal demikian, perhitungan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dijadikan acuan. Pendekatan demikian secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut.

Perhitungan total PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk tiap-tiap propinsi memang menggambarkan kekayaan daerah dari sudut produksi dan kegiatan ekonomi. Namun, apakah kekayaan propinsi juga menjadi kekayaan penduduknya, itu soal lain lagi. Pasalnya, tidak semua kegiatan ekonomi dimiliki oleh masyarakat disuatu daerah. Bisa saja suatu daerah hanya menjadi tempat terjadinya kegiatan ekonomi, yang kepemilikannya justru datang dari luar. Atau, sumber daya alam berada di daerah tersebut, namun segala produk dan kegiatan ekonominya diatur oleh korporasi global dan oleh pemerintah pusat. Sehingga hasilnya pun lebih banyak yang ditarik keluar daerah tersebut atau ke pemerintah pusat di Jakarta. Dengan kata lain, manfaat dan alokasi investasi dari keuntungan dinikmati oleh pemilik modal, sedangkan penarikan sebagian besar keuntungan bagi hasil dan pajak dinikmati oleh pemerintah pusat, untuk itu salah satu gambaran riil mengenai kamakmuran penduduk bisa digunakan tingkat konsumsi per kapita.

Bangsa Indonesia terdiri dari beberapa Propinsi dan Kabupaten/kota yang menjalankan perekonomian dengan cara dan strategi berbeda-beda. Setiap propinsi juga memberikan sumbangsih bagi perekonomian yang tidak sedikit. Kota Metro di propinsi Lampung, mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian di Lampung. Pertumbuhan ekonomi di kota Metro yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama kurun 7 Tahun (2004 – 2011) mengalami fluktuasi. Sebagai pembandingan, berikut merupakan laju pertumbuhan ekonomi di Bandar Lampung selama 4 periode.

Tabel 1. PDRB Harga Konstan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Bandar Lampung Periode 2009 – 2012.

Tahun	PDRB (Dalam Jutaan Rupiah)	Laju Pertumbuhan
2009	6,151,069	6.93
2010	6,540,521	6.01
2011	6,967,851	6.33
2012	7,423,369	6.54

Sumber : BPS Lampung, Bandar Lampung Dalam Angka, 2012

Dari data di atas dapat kita lihat, peningkatan PDRB Kota Bandar Lampung yang signifikan, belum terdapat penurunan pada PDRB harga konstan di Bandar Lampung yang merupakan Kota Madya.

Pada data PDRB Kota Metro yang merupakan Kota kedua setelah Kota Bandar Lampung juga terdapat peningkatan yang relatife stabil pada PDRB nya, tetapi dengan nilai yang tidak terlalu besar pada setiap peningkatan.

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Harga Konstan Tahun 2000 Di Kota Metro, Tahun (2004 – 2011).

Tahun	PDRB (Jutaan Rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)
2004	392.766	4,67
2005	426.900	8,69
2006	451.254	5,70
2007	479.394	6,24
2008	504.361	5,21
2009	531.202	5,32
2010	562.509	5,89
2011	598.519	6,40

Sumber: BPS Lampung, Kota Metro dalam angka, 2012

Hal yang menarik dari data di atas adalah laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama masa pengamatan pertumbuhan ekonomi mendatar dan relatif stabil.

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh BPS, penduduk di Kota Metro pada tahun 2004 berjumlah 123.740 jiwa, lalu pada tahun 2006 penduduk di Kota Metro bertambah sebanyak 11.330 jiwa atau laju pertumbuhan penduduk tahun 2006 sebesar 1,94 persen dari tahun 2005 dan terus mengalami peningkatan di setiap tahun nya.

Tabel 3. Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Metro Tahun 2004 – 2011.

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)
2004	123.740	2,82
2005	132.501	7,08
2006	135.070	1,94
2007	137.674	1,93
2008	140.314	1,92
2009	142.988	1,91
2010	145.471	1,74
2011	147.050	1,09
	Rata - rata	2,51

Sumber: BPS Lampung, Kota Metro dalam angka, 2012

Rata – rata pertumbuhan penduduk di Kota Metro dari tahun 2004 – 2011 adalah sebesar 2,51% baik di sebabkan kelahiran ataupun migrasi.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Penduduk Di Kota Metro Periode 2004 – 2011.

Tahun	Pendapatan Per Kapita (Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
2004	3,174,139	0.04
2005	3,326,243	0.05
2006	3,461,915	0.04
2007	3,630,562	0.05
2008	3,750,344	0.03
2009	3,715,010	-0.01
2010	3,866,815	0.04
2011	4,070,173	0.05

Sumber: BPS Lampung, Kota Metro dalam Angka, 2012.

Pada Tabel 3. menunjukkan laju pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk Kota Metro selama Tahun 2004 – 2011. Laju pertumbuhan pendapatan per kapita sempat turun pada tahun 2009 yaitu sebesar $-0,01\%$ atau berada pada posisi Rp 3.715.010, padahal pada tahun sebelumnya, tahun 2008 sebesar Rp 3.750.344. Semenjak tahun tersebut, pendapatan per kapita mulai menunjukkan peningkatan dan pada tahun 2011 pendapatan per kapita mencapai sebesar Rp 4.070.173 atau meningkat sebesar $0,05\%$ dari tahun 2010.

Adapun penulis memilih kota Metro adalah karena ingin melihat apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi perubahan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk kota Metro, karena itu penulis memilih judul "Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembagian Pendapatan Di Kota Metro Tahun 2004 – 2011".

B. Perumusan Masalah

Laju pertumbuhan PDRB dan laju pertumbuhan pendapatan per kapita Kota Metro pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 menunjukkan peningkatan

walaupun masih dapat dikatakan rendah. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Kota Metro terus mengalami perkembangan.

Oleh karena itu lah maka penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut untuk menjadi topik penelitian. Hal ini juga mengingatkan bahwa pemerataan distribusi pendapatan suatu daerah merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembangunan yang akan dikakukan oleh pemerintah kedepannya.

Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat mendorong pemerataan pendapatan bagi masyarakat Kota Metro.

Maka atas dasar itulah, penulis mengambil suatu permasalahan sebagai berikut:

“ Apakah dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi ketimpangan pendapatan di Kota Metro tahun 2004-2011? “

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Kota Metro tahun 2004-2011.
2. Untuk menganalisa Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Kota Metro tahun 2004-2011.
3. Untuk melihat dan menganalisa hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Kota Metro tahun 2004-2011.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Kota Metro

Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan oleh Pemerintah kota Metro sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pengalokasian dana pembangunan sesuai dengan kondisi alamnya yang dapat dikembangkan.

2. Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan untuk menambah pengetahuan masyarakat.

3. Penulis

- a. Sebagai bahan untuk penelitan sendiri dan syarat penyelesaian studi Strata SATU (S1) di fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian bagi peneliti lainnya agar dapat memberikan kontribusi yang positif bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan yang terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses ke arah pengurangan, penghapusan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi yang sedang berkembang (Todaro, 1983:123).

Makin merata distribusi pendapatan, maka makin besar persentase penduduk yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan (Sadono Sukirno, 1985:60).

Kebanyakan pengamat ekonomi menyatakan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pendapatan akan sangat timpang pada saat pertumbuhan ekonomi diubah pada waktu yang cepat.

Terdapat adanya pertumbuhan pendapatan di antara kelompok-kelompok yang tingkat pendapatannya berbeda-beda. Artinya, jika kelompok yang satu mengalami peningkatan pendapatan maka posisi yang lain secara relatif akan merosot (Todaro, 2000:220).

Pemerataan akan tercapai jika pendapatan terendah dalam masyarakat dinaikkan sedemikian rupa (Bruce Herrick/Charles P Kindleberger, 1988:163).

Prof. Gunar Myrdall berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab menyebab sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan yang semakin banyak dan membuat si miskin semakin terhambat.

Dampak balik cenderung memperbesar dampak dampak sebar cenderung mengecil. Secara komulatif kecenderungan ini memperbesar ketimpangan regional (M.L. Jhingan, 1999:211).

Menurut Prof. Simon Kuznet, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya (Todaro, 2000:144).

Menurut Milton. H. Spencer, pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertambahan output nyata atau pendapatan sebuah perekonomian dengan berlangsungnya waktu (Winardi, 1983:183).

Perkembangan meluasnya pembagian pendapatan ini dilakukan dengan cara pendistribusian pendapatan, dengan peneteskan ke bawah dari kelompok penduduk

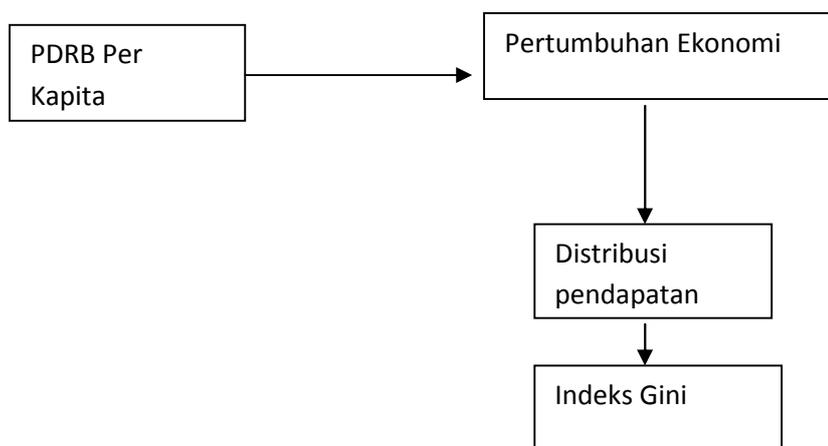
yang berpendapatan tinggi atau kaya ke kelompok penduduk berpendapatan rendah atau miskin (Emil Salim, 1983:45).

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat merupakan hal yang sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan pemerataan pendapatan merupakan sasaran dan tujuan dari pembangunan ekonomi, sehingga ketimpangan pendapatan yang terjadi dalam masyarakat tidak semakin curam (Winardi, 1983:185).

Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana pada suatu negara dapat kita pastikan dan dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan Kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana Kurva Lorenz itu berada.

Sehingga rasio inilah yang dikenal sebagai rasio konsentrasi Gini (*Gini concentration ratio*) yang sering kali disingkat dengan istilah koefisien Gini (*Gini coefficient*) (Todaro, 2000:187).

Pada gambar 1. dibawah ini menerangkan alur kerangka pemikiran dari penelitian ini.



Gambar 1. Konsep Kerangka Pemikiran

Dari gambar 1 diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh PDRB Per Kapita.

Kemudian pertumbuhan yang diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pendapatan yang diukur melalui indeks gini.

Lalu nilai distribusi pendapatan tersebut dijadikan dasar oleh pemerintah untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan pemerataan pendapatan bagi masyarakat. sehingga pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan mampu mempunyai kualitas pemerataan yang baik.

F. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka disusun hipotesis sebagai berikut:

“Diduga pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Kota Metro”.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Pembahasan, Bab V Kesimpulan dan Saran, Daftar Pustaka, serta Lampiran.

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, Manfaat Penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka yang berisikan teori - teori yang berhubungan dengan penulisan ini.

BAB III Metode penelitian yang berisi jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data, sampel, analisis, dan gambaran umum Kota Bandar Lampung.

BAB IV Pembahasan yang berisi pembahasan penelitian mengenai analisis pengaruh faktor sosial ekonomi (upah, umur, dan tingkat pendidikan) terhadap migrasi penduduk di Kota Bandar Lampung.

BAB V Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN